Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERATURAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : PER. 004/M.PPN/06/2006

TENTANG

RENCANA KERJA

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi masing-masing Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2007;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER 01/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER ..... /M.PPN/05/2006 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2007.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005-2009, selanjutnya disebut Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005-2009, adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode tahun 2005-2009.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2007, selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2007, adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode tahun 2007.

Pasal 2

Tujuan dan maksud penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2007 adalah sebagai :

a. penjabaran Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005-2009;

b. landasan ...

b. landasan bagi seluruh unit kerja di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2007 memuat rencana kegiatan dari seluruh Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 4

Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2007 berfungsi sebagai bahan acuan evaluasi kinerja Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5

Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2007 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 Juni 2006

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

H. PASKAH SUZETTA

RENCANA KERJA (RENJA)
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS
TAHUN 2007

DAFTAR ISI

BAB I LATARBELAKANG 1

A. Kondisi Umum 1
B. Identifikasi Masalah 8

BAB II TUJUAN DAN SASARAN 10

A. Tujuan Jangka Menengah 10
B. Sasaran Tahun 2007 10
1. Nasional 10
2. Kementerian Negara PPN/Bappenas 10

BAB III KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2007 13

A. Kebijakan Nasional 13
B. Kebijakan Kementerian Negara PPN/Bappenas 15
C. Program Prioritas dan Kegiatan Pokok Kementerian Negara PPN/Bappenas 16

BAB IV PENUTUP 23

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : USULAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2007

LAMPIRAN II : RANCANGAN ANGGARAN BAPPENAS, BAGIAN ANGGARAN 55 TAHUN 2006 DAN 2007

LAMPIRAN III : MATRIK KEGIATAN PER UNIT KERJA ESELON I TAHUN 2007

1. Lampiran Kegiatan Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan
2. Lampiran Kegiatan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
3. Lampiran Kegiatan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah
4. Lampiran Kegiatan Deputi Bidang Ekonomi
5. Lampiran Kegiatan Deputi Bidang SDA dan LH
6. Lampiran Kegiatan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
7. Lampiran Kegiatan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
8. Lampiran Kegiatan Deputi Bidang Pendanaan
9. Lampiran Kegiatan Inspektorat Utama
10. Lampiran Kegiatan Sesmeneg PPn/Sestama Bappenas

1 Latar Belakang

A. Kondisi Umum

Untuk menjamin pembangunan secara seksama, efektif, efisien, bersasaran dan terpadu dan menjamin tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 diperlukan arah kebijakan pemerintah. Arah kebijakan pemerintah ini, dituangkan dalam bentuk perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan. Upaya perencanaan pembangunan tersebut merupakan tugas dari lembaga perencanaan yang diemban oleh Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 9, 10, 11 dan 12 Tahun 2005 dan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional, Kementerian Negara PPN/Bappenas harus memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik di tingkat daerah, nasional maupun global baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Hal ini menjadi penting agar Kementerian Negara PPN/Bappenas memiliki arah yang jelas dalam mengkoordinasikan pembangunan secara nasional. Untuk itu, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) ke depan selama 5 tahun yang akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Negara PPN/Bappenas. Penyusunan Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2007 ini merupakan penjabaran untuk tahun ke 3 dari Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas periode 2005-2009.

Sebagaimana peran dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas periode 2005-2009 maka peran yang diemban adalah sebagai pengambil keputusan, *think tank*, koordinator dan administrator.

1. Peran sebagai **pengambil keputusan**:
   - Pengambil keputusan dalam kerangka kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang mencakup kebijakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Penentuan kebijakan perencanaan pembangunan termasuk penentuan alokasi sumber daya pembangunan yang merupakan keputusan yang sangat strategis dalam proses pembangunan. Pengalokasi sumberdaya ini sering diartikan hanya sebagai pengalokasi anggaran (*penganggaran*), padahal sebenarnya lebih luas dari itu. Alokasi sumber daya adalah muara dari tugas perencanaan, sehingga sebelum keputusan ini diambil semua rangkaian perencanaan telah dilaksanakan dengan seksama. Dari prespektif peran inilah maka diperlukan integrasi atau hubungan yang kuat antara perencanaan dan penganggaran.
   - Lembaga perencana adalah organ pemerintah yang menjalankan peran pekerjaannya yang lintas sektoral, lintas fungsi dan lintas wilayah. Setiap kegiatan perencanaan pembangunan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan penyediaan barang dan layanan publik adalah tugas unit perencana dari masing-masing kementerian /lembaga /pemerintah daerah (instansi pemerintah). Alokasi sumberdaya nasional untuk masing-masing instansi pemerintah menjadi tugas dari Bappenas sebagai perencana pusat. Sumberdaya nasional ini dialokasikan ke masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya dan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan yang disepakati. Oleh karena itu, Bappenas juga harus menetapkan prioritas, arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

- Dalam kaitannya dengan regulasi, Bappenas dituntut untuk berperan terlibat aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan untuk menjamin bahwa subtansi peraturan perundang-undangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dan dalam batas ketersedian sumber daya nasional.
- Di samping sebagai pengalokasi sumberdaya, Peran sebagai pengambil keputusan dapat membantu Presiden dan pimpinan eksekutif lainnya dalam penanganan masalah-masalah mendesak dan berskala besar seperti masalah impor gula, pemulangan TKI illegal dari Malaysia, wabah penyakit menular, dan bencana alam. Saat ini peran Bappenas membantu Presiden untuk mengkaji dan menyediakan alternatif keputusan belum berjalan optimal.

2. Peran Sebagai ***think-tank***:
   - Peran sebagai *think-tank* atau *policy planning center* adalah dalam rangka mendukung penyiapan materi perencanaan sehingga perencanaan yang dihasilkan harus berdasarkan kerangka berpikir ilmiah, realistik, dan berdasarkan data-data faktual yang terjadi di masyarakat. Menjadi lembaga perencana yang kredibel dan akuntabel harus dilandasi kelembagaan yang kuat di bidang penelitian, pengelolaan data, dan kemampuan analisis yang baik terhadap data dan fakta sehingga proyeksi ke depan lebih dapat diprediksi.
   - Merancang kegiatan dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang yang dimiliki serta untuk menghindari tumpang tindih, atau demi mencapai sinergitas maka perlu ada upaya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-progran dan kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh masing-masing kementerian/ lembaga pemerintah.

3. Peran sebagai **koordinator** yaitu kegiatan:
   - Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di kementerian/lembaga/daerah. Koordinasi ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta menjaga konsistensi pelaksanaan platform Presiden selama masa pemerintahannya. Konsistensi ini penting karena pencapaian *platform* Presiden tersebut yang menjadi tolok ukur kinerja yang pada akhirnya sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat. Salah satu contoh mendesaknya peran koordinasi ini adalah dalam penyusunan hubungan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Saat ini telah ada nota kesepakatan antara Bank Indonesia dan Pemerintah untuk saling berkoordinasi, namun belum ada lembaga di luar BI dan DepKeu yang merancang arah koordinasi ini antara dua kebijakan ini. Contoh lain menyangkut swasta. Karena peran swasta semakin penting, maka tugas koordinasi ini juga mencakup sebagai fasilitator bagi masyarakat luas untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan. Bappenas sebagai lembaga perencana pusat adalah instansi yang tepat bertugas untuk itu.
   - Melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan peningkatan sinergi pembangunan di berbagai sektor dan daerah. Tujuan dari tugas ini adalah menciptakan saling ketergantungan satu daerah dengan daerah yang lain dan untuk menciptakan pembangunan yang adil. Sebagai rujukan untuk melakukan tugas ini adalah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta alokasi sumber daya bagi masing-masing kementerian / lembaga. Oleh karena itu yang tepat melaksanakan tugas ini adalah Bappenas.

- Mengkoordinasikan kementerian dan lembaga dalam merancang dan melaksanakan kegiatan sistem deteksi dini dan sistem respons cepat. Sering peristiwa yang membutuhkan penanganan darurat sering membutuhkan penanganan berbagai kementerian/ lembaga pemerintah. Karena sifatnya ini, maka Bappenas adalah lembaga yang tepat sebagai koordinatornya.

4. Peran sebagai **administrator**:
   - Mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 menuntut suatu proses perencanaan yang cukup panjang, sehingga Bappenas dituntut mempunyai kemampuan manajerial administrasi di bidang pengelolaan pembangunan dari mulai penyusunan perencanaan, penetapan perencanaan, sampai dengan monitoring serta evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam penetapan rencana, mengelola proses penyatuan sikap pemerintah dalam menghadapi DPR. Sebagai contoh, di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dimana pada saat awal prosesnya dimulai dengan penentuan kebijakan tentang arah kebijakan tentang prioritas pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro pada tahun berikutnya serta pagu indikatif yang dibahas dalam sidang kabinet. Demikian juga pada tahap akhir proses ini, juga rancangan akhir RKP dibahas dalam sidang kabinet juga. Setelah RKA-KL selesai dibahas di DPR, Bappenas bertugas mengkaji perbedaannya dengan RKP untuk selanjutnya merekomendasikan ke Presiden untuk dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres).
   - Melaksanakan perencanaan partisipatif lintas sektor dan daerah di semua jenjang perencanaan agar terbentuk rasa memiliki dari daerah terhadap kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah pusat.

- Dalam rangka pelaksanaan APBN, maka lembaga perencanaan dapat berperan dalam: (1) monitoring dan evaluasi; (2) koordinasi kegiatan kementerian / lembaga; (3) menyusun dan memantau pelaksanaan kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah; dan (4) menyusun peraturan lebih rinci pelaksanaan *good governance* dalam pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan upaya merumuskan dan menerapkan arah pembangunan sehingga didapatkan pergerakan yang efisien dan efektif. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas berdasarkan penjabaran peran-peran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. ***Perencanaan dan Penganggaran. Tugas perencanaan dan penganggaran ini meliputi tugas dalam menyusun strategi alokasi sumber daya pembangunan secara optimal, serta mengelola pinjaman luar negeri dan merancang kegiatan yang dibiayainya.***

   Agar penyusunan alokasi sumber daya secara optimal, terlebih dahulu harus ada rencana yang disusun oleh perencana yang berpengetahuan luas di bidang yang direncanakan. Untuk menjaga pelaksanaan konsisten dengan yang direncanakan, perencanaan perlu dirangkai dengan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi kinerja ke dalam satu rangkaian dengan kegiatan pengalokasian sumber daya. Dengan demikian, sebelum sumber daya dialokasikan rangkaian kegiatan perlu didahului dengan pertama penggalian pengetahuan tentang apa yang akan direncanakan, kedua menyebarkan pengetahuan agar terjadi kesamaan persepsi, ketiga menggunakan pengetahuan tersebut dalam perencanaan, keempat penyusunan rencana penanganan masalah mendesak, dan kelima penyusunan rancangan kebijakan pemerintah.

Sebagai tindaklanjut dari langkah-langkah di atas dilakukan penyusunan strategi pengelolaan pinjaman luar negeri (PLN) dan merancang kegiatan yang dibiayainya dengan latarbelakang pemikiran bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sumberdaya pembangunan yang terbatas. Beberapa pilihan muncul dalam penyusunan strategi antara lain pilihan pertama adalah melaksanakan pembangunan menggunakan sumberdaya yang tersedia walau dengan konsekuensi mungkin akan lebih lambat. Pilihan berikutnya adalah menutup kekurangan dengan dana-pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pilihan ini didasari oleh beban bunganya rendah, dengan disertai pengelolaan yang baik. Artinya, bahwa PLN masih menjadi pilihan yang menarik untuk menutup kekurangan sumberdaya pembangunan dengan catatan perlu adanya strategi pengelolaan yang baik agar manfaat PLN dapat terealisasi.

Ditambah dengan pencapaian yang telah dihasilkan (berupa dokumen perencanaan : Rancangan RKP, Rancangan RPJM, Rancangan RPJP, dan lain-lain.

2. ***Penyusunan Kebijakan Pembangunan, melalui koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan peningkatan sinergi pembangunan di berbagai sektor dan daerah.***

Kebijakan pembangunan masih bersifat sektoral, sehingga diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi agar semua sinergi menuju pembangunan nasional.

Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik tingkat Nasional maupun di daerah di semua provinsi dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3. *Berperan Aktif dalam Penyusunan Undang-Undang*

Sesuai tugas Bappenas untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi perencanaan pembangunan, maka agar kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan, maka agar kebijakan dimaksud dapat terefleksikan dalam UU, maka Bappenas perlu berperan aktif dalam penyusunan dan pembahasan UU

4. *Merancang kegiatan sistem deteksi dini dan mengkoordinasikan penanganan masalah mendesak.*

Koordinasi yang telah dijalankan antara lain koordinasi penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh dan Nias. Koordinasi hal seperti itu penting dan harus segera di tangani oleh lembaga perencanaan.

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan yang diharapkan tersebut, maka suatu rencana detail yang dituangkan dalam rencana kerja (renja) tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas.

Selanjutnya Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk tahun 2007.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka mengemban tugas dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra maka permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2007 dalam mencapai tujuan visi dan misi organisasi adalah :

1. Masih kurangnya peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas analisis, kajian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, termasuk penyusunan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat lintas dimensi.
2. Masih lemahnya penataan dan pengembangan kapasitas organisasi, budaya organisasi, serta kemampuan untuk membangun secara tangguh dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mendukung pelaksanaan peran pengambilan keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan nasional.
3. Masih belum optimalnya pemanfaatan potensi dan kompetensi SDM perencana dan kurangnya peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
4. Masih kurangnya peningkatan kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* dalam penyusunan rencana pembangunan dengan penguatan penataan dan peningkatan kualitas hubungan kerja dengan lembaga legislatif dan kementerian/lembaga mitra kerja.
5. Masih kurangnya penyelenggaraan konsultasi dan komunikasi publik dalam rangka menemukenali permasalahan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan.
6. Masih kurangnya pemantapan peran dalam penyusunan RAPBN, pengelolaan perencanaan PHLN, dan sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.

2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan nasional sesuai agenda RPJMN 2004-2009.
2. Memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional dan menjadi organisasi yang handal dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin tujuan bernegara.

B. Sasaran Tahun 2007

1. Nasional

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas nasional adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi tercermin dari :
   1. Optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009
   2. Percepatan penanganan korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan termasuk aparat penegak hukum
   3. Meningkatnya akuntabilitas lembaga-lembaga politik, publik dan masyarakat

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik tercermin dari:
   1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan;

2. Terbenahinya manajemen kepegawaian mencakup sistem renumerasi, data PNS, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja melalui penyempurnaan DP3, dan penerapan *reward and punishment*.

c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur pelayanan dan penegak hukum melalui peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai penyelenggaraan diklat dan pembenahan manajemen kepegawaian.

d. Diterapkannya *E-Services* di setiap instansi pelayanan publik.

e. Tersusunnya kebijakan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.

2. Kementerian Negara PPN/Bappenas

Untuk mencapai tujuan jangka menengah, maka sasaran tahun 2007 yang akan dicapai dalam Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas adalah :

a. Meningkatnya kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas analisis, kajian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, termasuk penyusunan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat lintas dimensi.

b. Terwujudnya penataan dan pengembangan kapasitas organisasi, budaya organisasi, serta membangun kemampuan yang kuat/tangguh dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pelaksanaan peran pengambilan keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan nasional.

c. Meningkatnya potensi dan kompetensi SDM disertai dengan peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.

d. Lebih terbangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* dalam penyusunan rencana pembangunan dan peraturan perundang-undangan dengan penguatan penataan dan peningkatan kualitas hubungan kerja dengan lembaga legislatif dan kementerian/lembaga mitra kerja.

e. Terwujudnya penyelenggaraan konsultasi dan komunikasi publik dalam rangka menemukenali permasalahan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan.

f. Terwujudnya pemantapan peran dalam penyusunan RAPBN, mengelola perencanaan PHLN, dan sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.

3 Kebijakan Prioritas Tahun 2007

A. Kebijakan Nasional

Pilihan kebijakan yang diambil Kementerian Negara PPN/Bappenas sejalan dan mendukung kebijakan nasional yang terdapat dalam pembangunan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan kerangka regulasi dan kerangka investasi dan layanan publik. Pengembangan kebijakan nasional untuk Kerangka Regulasi meliputi kegiatan pemerintah dalam rangka pengaturan, pemfasilitasian, atau pengkoordinasian pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sedangkan dalam kerangka investasi dan layanan publik adalah kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik serta investasi pemerintah. Adapun kebijakan nasional pada tahun 2007 diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah aparatur negara yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *good public governance* secara konsisten dan berkelanjutan pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan.
2. Mengurangi korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan dengan memberi sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat, dan mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.
4. Pembenahan manajemen pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan secara bertahap dan konsisten di pusat

dan daerah yang efektif dan efisien serta berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan para pegawainya.

5. Pembenahan manajemen sumber daya manusia aparatur (kepegawaian) mencakup penataan sistem remunerasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja melalui penyempurnaan DP3, dan penerapan *reward and punishment* dalam pembinaan pegawai.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan akurasi data sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian.
7. Mempercepat penerapan teknologi informasi dan komunikasi *(e-Services)* di setiap instansi pelayanan publik, dan pemanfaatan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dengan menerapkan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) sebagai upaya mendukung terbentuknya Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan penataan sistem koneksi (inter-phase) tahap awal NIK dengan sistem informasi di kementerian/lembaga terkait.
9. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai di instansi pemerintahan.
10. Mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, tidak diskriminatif dan memuaskan pada unit-unit kerja pelayanan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

B. Kebijakan Kementerian Negara PPN/Bappenas

Untuk mencapai sasaran Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2007 di atas maka kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan melalui analisis kebijakan, pengkajian, dan perumusan isu-isu strategis, dan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat multi dimensi termasuk kualitas hasil pemantauan dan evaluasi program pembangunan
2. Pemantapan organisasi Bappenas sesuai dengan kompetensi lembaga melalui pengembangan mekanisme kerja, penerapan sistem manajemen organisasi, dan akuntabilitas kinerja termasuk penerapan kinerja berbasis anggaran, dilakukan secara konsisten pada semua jajaran guna mendukung pelaksanaan peran pengambilan keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan.
3. Mendorong peran aktif Bappenas dalam penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kebijakan perencanaan nasional terefleksikan dalam peraturan perundang-undangan
4. Membantu memfasilitasi peningkatan kemampuan SDM lembaga perencana baik di tingkat pusat maupun di daerah.
5. Meningkatkan akses dan penguasaan data/informasi statistik, hasil-hasil litbang, peta wilayah dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional.
6. Peningkatan kualitas koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk mewujudkan integrasi lintas sektor pembangunan dan fungsi kelembagaan, khususnya sikronisasi dan

sinergi antara program pembangunan dan anggaran pembangunan.

7. Pengembangan proses partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta penerapan sistem Keterbukaan informasi tentang rencana dan hasil-hasil pembangunan kepada *stakeholder* dan masyarakat.

8. Pemantapan posisi perencanaan dalam proses penyusunan RAPBN, pengelolaan PHLN, sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.

C. Program Prioritas dan Kegiatan Pokok Kementerian PPN/ Bappenas

Dalam rangka mencapai tujuan dan melaksanakan kebijakan di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan program dan nama kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

a. Uraian Program dan Jenis Kegiatan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Dalam program ini, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 dan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tahun 2007, serta terlibat aktif didalam penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan pemantapan penyusunan database perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan (3) tiga kegiatan pokok :

Kegiatan 1	:	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan
Kegiatan 2	:	Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja Bappenas dengan kementerian/lembaga di pusat dan lembaga perencanan di daerah
Kegiatan 3	:	Penciptaan sistem administrasi pendukung dan database perencanaan yang efektif dan efisien

Kategori jenis kegiatan yang direncanakan di Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada Kementerian Negara PPN/Bappenas yaitu :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan
2. Kajian Prakarsa Strategis dan Isu Strategis
3. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
4. Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
5. Penyusunan Database

b. Pagu Indikatif

Pagu indikatif untuk Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan adalah sebesar Rp 126,65 Milyar yang terdiri dari Rupiah Murni 95 Milyar dan 31,65 Milyar dari PHLN dengan rincian pagu untuk kegiatan pokok adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan sebesar Rupiah Murni Rp 79 Milyar dan 31,65 Milyar dari PHLN
2. Kegiatan Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja Bappenas dengan kementerian/lembaga di pusat dan lembaga perencanaan di daerah sebesar Rp 8,3 Milyar
3. Kegiatan Penciptaan sistem administrasi pendukung dan database perencanaan yang efektif dan efisien sebesar Rp 7,7 Milyar

Dari masing-masing ke 3 (tiga) kegiatan diatas terinci pada Lampiran 1-8 dan 10.

2. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

a. Uraian Program dan Jenis Kegiatan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas termasuk kegiatan rutin lainnya antara lain penggajian. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan 4 (empat) kegiatan pokok :

Kegiatan 1	:	Penyediaan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan
Kegiatan 2	:	Pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan
Kegiatan 3	:	Penyelenggaraan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga; dan
Kegiatan 4	:	Pengembangan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan

Kategori kegiatan yang direncanakan di Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan pada Kementerian Negara PPN/Bappenas yaitu :

untuk menjalankan fungsi kegiatan rutin khususnya penggajian pegawai, pelaksanaan administrasi pimpinan termasuk Dana Operasi Menteri (DOM), kegiatan kehumasan, dan kegiatan administrasi pimpinan lainnya.

b. Pagu Indikatif

Pagu indikatif untuk Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan adalah sebesar Rp 52,19 Milyar yang rincian pagu untuk kegiatan pokok adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan sebesar Rp 1,8 Miliar.
2. Pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan sebesar Rp 46,39 Miliar.

3. Penyelenggaraan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga sebesar sebesar Rp 2 Miliar.
4. Pengembangan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan sebesar Rp 2 Miliar

Dari masing-masing ke 4 (empat) kegiatan di atas terinci pada Lampiran 10.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

a. Uraian Program dan Jenis Kegiatan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung proses pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) kegiatan pokok :

Kegiatan 1	: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan
Kegiatan 2	: Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional

Kategori kegiatan yang direncanakan di Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dan Kepemerintahan pada Kementerian Negara PPN/Bappenas yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi di bidang pelayanan umum internal Bappenas
2. Kegiatan Monitoring yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan umum internal Bapenas
3. Pemeliharaan dan peningkatan Sarana dan Prasana Fisik Bappenas.
4. Menunjang terciptanya *e-government* dan *e-services* di lingkungan Bappenas

b. Pagu Indikatif

Pagu indikatif untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara adalah sebesar Rp 60 Milyar yang rincian pagu untuk kegiatan pokok adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan sebesar Rp 10,1 Miliar.
2. Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional sebesar Rp 49,9 Miliar.

Dari masing-masing ke 2 (dua) kegiatan di atas terinci pada Lampiran 10.

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara

a. Uraian Program dan Jenis Kegiatan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung proses pendidikan, pembinaan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Perencana. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/ Bappenas menetapkan 5 (lima) kegiatan pokok:

Kegiatan 1	:	Penataan kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS
Kegiatan 2	:	Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur
Kegiatan 3	:	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur
Kegiatan 4	:	Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS
Kegiatan 5	:	Penyiapan dan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian

Kategori kegiatan yang direncanakan di Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara pada Kementerian Negara PPN/Bappenas yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Aparatur Perencana melalui Sistem Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur Perencana
2. Kegiatan Pendidikan/Pelatihan Aparatur Perencana baik untuk perencana pusat maupun perencana daerah

b. Pagu Indikatif

Pagu indikatif untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara adalah sebesar Rp 37,61 yang rincian pagu untuk kegiatan pokok adalah sebagai berikut:

1. Penataan kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS sebesar Rp 700 Juta.
2. Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur sebesar Rp 300 Juta.
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur sebesar Rp 33,01 Miliar.
4. Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS sebesar Rp 3 Miliar.
5. Penyiapan dan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian sebesar Rp 600 Juta.

Dari masing-masing ke 5 (lima) kegiatan di atas terinci pada Lampiran 10.

5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

a. Uraian Program dan Jenis Kegiatan

Program ini diusulkan dapat terlaksana pada tahun 2007 dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan aparatur di lingkungan Bappenas sehingga dapat tercipta *good governance* di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas terutama sebagai kementerian/lembaga percontohan bebas

KKN. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan tiga kegiatan pokok :

Kegiatan 1	:	Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat
Kegiatan 2	:	Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum
Kegiatan 3	:	Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Kegiatan 4	:	Pengembangan dan peningkatan sistem informasi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan
Kegiatan 5	:	Pelaksanaan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan

Kegiatan-kegiatan di atas dilaksanakan untuk mencakup proses pendidikan, pembinaan dan pelatihan di bidang pengawasan dan audit, peningkatan sistem informasi pengawasan fungsional, evaluasi kinerja yang terkait secara keuangan/penganggaran dan kelembagaan dan berbagai kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas aparatur Kementerian Negara PPN/Bappenas.

b. Pagu Indikatif

Pagu indikatif untuk Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara adalah sebesar Rp 3 Miliar yang rincian pagu untuk kegiatan pokok adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat sebesar Rp 700 Juta.
2. Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum sebesar Rp 300 Juta.
3. Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif sebesar Rp 600 Juta.
4. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan sebesar Rp 900 Juta.
5. Pelaksanaan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan sebesar Rp 500 Juta.

Dari masing-masing ke 5 (lima) kegiatan di atas terinci pada Lampiran 9.

4 Penutup

Dokumen Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2007 yang memuat program dan kegiatan pokok merupakan acuan bagi seluruh unit kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renja ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Kementerian Negara PPN/Bappenas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Renja ini akan dilakukan oleh unit kerja eselon I dan II yang selanjutnya dapat menyusun Renja masing-masing unit kerja sesuai dengan visi, misinya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
I	**DIREKTORAT KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT**	
1	Pengembangan "National Health Account"	Tersusunnya rekomendasi pengembangan "National Health Account"
2	Koordinasi Perencanaan dan Kebijakan Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Tersusunnya laporan hasil diskusi ttg isu-isu strategis yg terkait dg pemb. kesehatan dan gizi masyarakat sbg bahan penyusunan kebijakan
3	Koordinasi Pengelolaan Perencanaan PHLN Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Tersusunnya laporan & rekomendasi ttg pengelolaan perencanaan PHLN bidang kesehatan dan gizi masyarakat
4	Pemantauan dan Pelaksanaan RKP Tahun 2007 Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Tersusunnya dokumen laporan dan rekomendasi pemantauan atas pelaksanaan program bidang kesehatan dan gizi masyarakat dalam RKP 2007
5	Evaluasi Kebijakan dan Program Pengawasan Obat dan Makanan	Tersedianya dokumen laporan evaluasi Program Pengawasan Obat dan Makanan
6	Pengembangan Database Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Tersusunnya laporan pengembangan database bidang kesehatan dan gizi masyarakat
II	**DIREKTORAT KEPENDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	
1	Analisis Gender dalam perencanaan Pembangunan	Tersusunnya analisis gender dalam pembangunan dengan fokus/titik berat: a) Evaluasi PUG pusat dan daerah tahun 2005-2006; b) Analisis gender untuk beberapa program pembangunan.
2	Koordinasi Perencanaan Kebijakan dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Terumuskannya rekomendasi kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan tersedianya rumusan indikator-indikator utama pembangunan kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan anak
3	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Anak	Tersedianya dokumen laporan evaluasi dan rekomendasi kebijakan pembangunan anak.
4	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tersusunnya laporan pemantauan pelaksanaan program pembangunan yang termasuk dalam RKP 2007 dan RPJM 2004-2009 sebagai laporan tahunan keberhasilan / kelemahan pencapaian program pembangunan.
5	Pengembangan Database di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tersedianya data dan informasi yang up to date dan terbentuknya bank data terpadu yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan nasional secara keseluruhan.
6	Dana Pendamping Proyek Kesehatan Reproduksi Esensial (KRE) Program Bantuan UNFPA Siklus ke-7 (2006-2010) Tahun 2007	Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program bantuan UNFPA agar dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna dengan cara memfasilitasi berbagai kegiatan koordinasi (perencanaan, implementasi, pemantauan, pelaporan dan evaluasi)

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
III	DIREKTORAT KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA (DIREKTORAT KEBUDAYAAN DAN IPTEK)	
1	Kajian Perintis Pengembangan Industri Budaya dan Olah raga Bagi Kepariwisataan	Teridentifikasinya pola dan bentuk awal untuk pengembangan industri budaya dan olah raga bagi kepariwisataan
2	Forum Diskusi Kebudayaan dan Pariwisata	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bid. kebudayaan dan pariwisata
3	Forum Perencanaan Pemb. Pemuda dan Olahraga	Tersusunnya rekomendasi kebijakan pembangunan Pemuda dan Olahraga
4	Monitoring Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Terselenggaranya monitoring bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olah raga
5	Evaluasi Pembangunan Bid. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Terevaluasinya pemb. bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga
6	Penyusunan Database Bid. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tersusunnya database bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga
IV	DIREKTORAT AGAMA DAN PENDIDIKAN	
1	Kajian Lembaga Sosial Keagamaan Dalam Pengembnagan Wawasan Multikultural	Tersusunnya rekomendasi tentang kajian lembaga sosial keagamaan dalam pengembangan wawasan multikultural.
2	Kajian Kesiapan Lembaga Pendidikan Tinggi Dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Pendidik Dalam Jumlah dan Kualitas Yang Sesuai Dengan Standar Nasional Pendidikan.	Tersusunnya rekomendasi tentang Kesiapan Lembaga Pendidikan Tinggi Dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Pendidik Dalam Jumlah dan Kualitas Yang Sesuai Dengan Standar Nasional Pendidikan.
3	Koordinasi Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan	Tersusunnya laporan hasil diskusi ttg isu-isu strategis yg terkait dg pemb. Agama dan pendidikan sbg bahan penyusunan kebijakan
4	Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2007 Bidang Agama dan Pendidikan	Tersusunnya dokumen laporan pemantauan atas pelaksanaan program bidang agama dan pendidikan dalam RKP 2007.
5	Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan	Tersedianya dokumen laporan evaluasi tentang Desentralisasi Pendidikan
6	Pengembangan Database Bidang Agama dan Pendidikan	Tersusunnya laporan pengembangan database bidang agama dan pendidikan

LAMPIRAN 2

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
I	DIREKTORAT HUKUM DAN HAM	
1	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Antar Sektor di Bidang Investasi	inventarisasi peraturan per-uu-an beprotensi bertentangan dengan per-uu-an nasional di bidang investasi rekomendasi dalam rangka melakukan harmonisasi peraturan per-uu-an di bidang investasi antar sektor
2	Koordinasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penyiapan dan Penyusunan RKP Bidang Hukum dan HAM	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan RKP
3	Pemantauan Pelaksanaan RKP di Bidang Hukum dan HAM	Laporan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan RKP di bidang Hukum dan HAM
4	Evaluasi Pelaksanaan RKP di Bidang Hukum dan HAM	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Hukum dan HAM
5	Pengembangan Database Pembangunan Hukum	Tersedianya data pembangunan di bidang hukum
6	Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009	Terselenggaranya Forum Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK
II	DIREKTORAT PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
1	Kajian Rumusan Model Kebijakan Koordinasi dan Perkuatan Intelijen Nasional	Laporan hasil kajian dan rumusan perbaikan kebijakan koordinatif intelijen nasional, serta studi perencanaan institutional arrangement intelijen
2	Evaluasi Pelaksanaan Program Pertahanan dan Keamanan	Laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan program pertahanan dan keamanan dalam rangka
3	Koordinasi Pelaksanaan Program Pertahanan dan Keamanan	Keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan RPJM 2004-2009
4	Monitoring Pelaksanaan Program Pertahanan dan Keamanan	Laporan kegiatan monitoring pelaksanaan program dalam RKP 2007 di bidang pertahanan dan keamaman
5	Pengembangan Data Base Bidang Pertahanan dan Keamanan	Tersedianya database bidang pertahanan dan keamanan yang *up to date* dan dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan nasional

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
III	**DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI**	
1	Studi Tentang Pola Komunikasi Politik Efektif Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Publik	Tersusunnya Pola Komunikasi Politik Sebagai Rekomendasi Dalam Penyusunan Kebijakan Publik
2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi
3	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi	Laporan Monitoring Program Pembangunan Bidang Kominfo (RKP) Tahun 2007
4	Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi
5	Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi	Tersusunnya Basis Data dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi
6	Pengelolaan Dana Hibah USAID untuk *SOAg Democratic and Decentralized Governance*	Terkoordinasinya *Implementing Agency* dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai MoU
IV	**DIREKTORAT APARATUR NEGARA**	
1	Rencana Tindak Penerapan Manajemen Kinerja di Instansi Pemerintah	Tersusunnya Hasil Kajian Rencana Tindak Penerapan Manajemen Kinerja di Instansi Pemerintah
2	Koordianasi Pelaksa naan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	Terselenggaranya Koordianasi Pelaksanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
3	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	Terselenggaranya Pemantauan Pelaksa naan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
4	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	Adanya Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
5	Pengembangan Database Pelaksanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	Tersusunnya dan termutakhirkannya Database Pelaksanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
6	Proyek Pendukung Kebijakan Reformasi Audit Publik/Project STAR-SDP	Terlaksananya Kegiatan Untuk Mendukung Reformasi Audit Publik
7	Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik.	Terselenggaranya kegiatan pengembangan kebijakan tata pemerintahan yang baik secara koordinatif

LAMPIRAN 3

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
I	**Direktorat Penanggulangan Kemiskinan**	
1	Kajian Replikasi Program Subsidi Langsung Tunai	Rekomendasi Kajian Replikasi Program Subsidi Langsung Tunai
3	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka pencapaian MGGs	Peningkatan keterpaduan penanggulangan kemiskinan sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2007
4	Pemantauan Pelaksanaan Program-program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2007	Sinergi upaya pelaksanaan program-program penanggulangan Kemiskinan Tahun 2007
5	Evaluasi Pelaksanaan Program-program pemberdayaan masyarakat terkait dengan penanggulangan kemiskinan	Rekomendasi penyempurnaan kebijakan pemberdayaan masyarakat
6	Penyusunan Database Kemiskinan Tahun 2008	Ketersediaan dan pemutakhiran Database Penanggulangan Kemiskinan
II	**DIREKTORAT TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA**	
1	Analisa Informasi Pasar Kerja dalam rangka Mendukung perluasan Kesempatan Kerja	Tersusun Kebijakan
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan	Terkoordinasinya Pembangunan Ketenagakerjaan
3	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan RKP 2007 Bidang Ketenagakerjaan	Teriden tifikasi permasalahan
4	Evaluasi Program-Program RKP 2006 Bidang Ketenagakerjaan	Terukurnya hasil
5	Penyusunan Database Ketenagakerjaan	Tersusun database.
III	**DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	
1	Studi Kebijakan Pelaksana an Jaminan Sosial dalam Rangka meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	Tersusun Kebijakan
2	Koordinasi Perencanaan program-program Perlindungan Sosial	Terkoordinasinya Perlindungan Sosial
3	Pemantauan Pelaksanaan Program-program Perlindungan Sosial	Teridentifikasi permasalahan
4	Evaluasi Program-Program Perlindungan Sosial	Terukurnya hasil
5	Penyusunan Database dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program	Tersusun database.

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
IV	DIREKTORAT PEMBINAAN UKM DAN KOPERASI	
1	Kajian Tentang Pemberdayaan UKM dan Koperasi	Tersusunnya Kajian Tentang Pemberdayaan UKM dan Koperasi
2	Koordinasi Penyusunan Rencana Pendanaan Pembangunan di Bidang Pemberdayaan UKM dan Koperasi	Tersusunnya Laporan Koordinasi Penyusunan Rencana Pendanaan Pembangunan di Bidang Pemberdayaan UKM dan Koperasi
3	Pemantauan Pelaksanaan Program-program Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan program Pemberdayaan UMKM dan koperasi
4	Evaluasi Program-program Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dan Mid Term Review RPJM Tahun 2004-2009	Tersusunnya Laporan Evaluasi RKP 2007 dan Laporan Mid Term Review RPJM Tahun 2004-2009
5	Pengembangan Database UMKM dan Koperasi	Tersusunnya Database UMKM dan Koperasi serta Hasil Analisis data UMKM dan Koperasi

LAMPIRAN 4

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Ekonomi

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
I	**DIREKTORAT PERENCANAAN MAKRO**	
1	Kajian Ekonomi Makro 2007	Terselenggaranya output kajian ekonomi makro 2007
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Makro Tahun Anggaran 2007	Terselenggaranya koordinasi di bidang perencanaan makro dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2007
3	Monitoring Pelaksanaan RKP 2007	Terselenggaranya pemantauan kinerja program stabilitas ekonomi makro RKP Tahun 2007
4	Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2006	Terselenggaranya evaluasi kinerja RKP bidang Ekonomi Makro Tahun 2006
6	Pengembangan Basis Data Ekonomi Tahun Anggaran 2007	Terciptanya basis data di bidang ekonomi makro
II	**DIREKTORAT KEUANGAN NEGARA**	
1	Kajian Kerangka Subsidi di Indonesia	Tersedianya hasil kajian berupa strategi subsidi beserta rekomendasi penyempurnaannya
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2007	Terselenggaranya konsultasi serta koordinasi dengan mitra kerja dan instansi terkait lainnya tentang issue serta kebijakan di bidang keuangan negara guna penyusunan RKP TA 2008
3	Penyusunan dan Pemantauan Pelaksanaan RPJM 2004-2009 dan RKP Tahun 2007	Terselenggaranya pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM dan RKP Tahun 2007 yang hasilnya sebagai masukan atau perbaikan/ penyempurnaan dan penyusunan perencanaan program-program periode selanjutnya
4	Evaluasi Program Pelaksanaan RKP Th. 2006 Tahun Anggaran 2007	Tersusunnya hasil evaluasi kinerja pembangunan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/ penyempurnaan pelaksanaan program-program pembangunan periode selanjutnya
5	Pengembangan Basis Data Keuangan Negara Tahun 2007	Tersedianya basis data yang mutahir yang mencakup kebijakan, peraturan perundang-undangan dan data/informasi secara terus menerus di bidang Keuangan Negara untuk membantu proses penyusunan program pembangunan pemantauan dan evaluasi program pembangunan tersebut serta analisis kebijakan pembangunan

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Ekonomi

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
III	**DIREKTORAT PERDAGANGAN, INVESTASI & KEI**	
1	Pengkajian iklim investasi di daerah perdesaan di Indonesia	Tersedianya hasil kajian mengenai iklim investasi di daerah perdesaan, termasuk di antaranya: faktor-faktor yang menghambat pencapaian iklim investasi yang kondusif di daerah perdesaan
2	Koordinasi Perencanaan Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dan instansi terkait lainnya tentang issue serta kebijakan di bidang perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional
3	Monitoring Perencanaan Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Terselenggaranya kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional, yg hasilnya sebagai masukan atau perbaikan/ penyempurnaan dan penyusunan perencanaan pembangunan periode selanjutnya
4	Evaluasi Perencanaan Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Tersusunnya hasil evaluasi kinerja pembangunan di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional sebagai bahan masukan untuk perbaikan/ penyempurnaan pelaksanaan program-program pembangunan periode selanjutnya
5	Database Perencanaan Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Tersedianya basis data termutakhirkan yang mencakup kebijakan, peraturan perundang-undangan dan data/informasi secara terus menerus di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional untuk membantu proses penyusunan program pembangunan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan serta analisis kebijakan pembangunan
IV	**DIREKTORAT JASA KEUANGAN DAN ANALISIS MONETER**	
1	Pengembangan model analisis pasar uang dan pasar modal.	Tersusunnya kajian berupa pengembangan model pasar uang dan pasar modal.
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jasa Keuangan dan Analisis Moneter.	Terselenggaranya koordinasi di bidang jasa keuangan dan analisis moneter dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2008.
3	Pemantauan Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan RKP Tahun 2007.	Terselenggaranya pemantauan kinerja Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan serta Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan Tahun 2007.
4	Evaluasi terhadap Pengembangan Model Analisis Inflasi dan Nilai Tukar.	Terselenggaranya kegiatan evaluasi terhadap model inflasi dan nilai tukar pada Direktorat Jasa Keuangan dan Analisis Moneter.
5	Pengembangan Basis Data Sumber-sumber Pembiayaan Mikro.	Terbangunnya basis data perkembangan sumber-sumber pembiayaan mikro pada sektor-sektor prioritas.

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Ekonomi

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
V	DIREKTORAT INDUSTRI, IPTEK DAN BUMN	
1	Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur	Pilihan kebijakan pembangunan industri manufaktur agar mampu bersaing di pasar global
2	Koordinasi Sektor Industri,Iptek dan BUMN Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi	Peningkatan kebijakan yang terpadu pada sektor Industri, Iptek dan BUMN guna mendukung keberhasilan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2007
3	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Industri,Iptek dan BUMN	Ketersediaan program perencanaan terpadu pembangunan sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata tahun 2007
4	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Industri,Iptek dan BUMN	Tersedianya laporan kemajuan pelaksanaan laporan program pembangunan tahun anggaran 2006 pada sektor Industri, Iptek dan BUMN.
5	Penyusunan database Pembangunan Sektor Industri,Iptek dan BUMN	Tersedianya Database pembangunan sektor Industri,Iptek dan BUMN yang akurat, dan akuntabel

LAMPIRAN 5

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
I	**DIREKTORAT PANGAN DAN PERTANIAN**	
1	Penyusunan Strategi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pertanian (Kelembagaan Pembiayaan Pertanian dan Layanan Usaha)	Tersusunnya dokumen kajian strategi pengembangan dan penguatan kelembagaan pertanian
2	Koordinasi Pembangunan 'Revitalisasi Pertanian Tahun 2007	Terlaksananya koordinasi lintas sektor untuk pembangunan Revitalisasi Pertanian tahun 2005
3	Penyusunan dan Pemantauan Pembangunan Revitalisasi Pertanian Tahun 2007	Tersusunnya laporan pemantauan Revitalisasi Pertanian Tahun 2007
4	Evaluasi Pembangunan Revitalisasi Pertanian Tahun '2007	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan pembangunan Revitalisasi Pertanian Tahun 2007
5	Pengembangan Database Pembangunan Bidang Pangan dan Pertanian Tahun 2007	Tersedianya data dan informasi pembangunan bidang pangan dan pertanian
II	**DIREKTORAT KEHUTANAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**	
1	Penyusunan Strategi Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan	Dokumen Strategi Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan
2	Koordinasi Revitalisasi Sektor Kehutanan	Kesepahaman persepsi dan keserasian kebijakan dalam pembangunan kehutanan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat agar tercipta kondisi hutan yang lestari dan berkelanjutan
3	Penyusunan dan Pemantauan Pelaksanaan Program Pemb.sektor Kehutanan dan KSDA	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan program pemb. sektor Kehutanan dan KSDA
4	Evaluasi Kebijakan dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang terkait dengan sektor Kehutanan	Laporan hasil pelaksanaan kaji ulang kebij. perencanaan pembangunan di sektor Kehutanan dan KSDA
5	Pengembangan Basis Data Sektor Kehutanan khususnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di sektor kehutanan	Terciptanya pengembangan basis data yang telah ada dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di sektor kehutanan
III	**DIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
1	Kajian Kebijakan Pengoperasian Alat Tangkap Trawl	Tersusunnya rumusan dan rekomendasi pilihan kebijakan pengoperasian alat tangkap trawl
2	Koordinasi Pembangunan Bidang Kelautan & Perikanan	Terselenggaranya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, dokumen PHLN, Buku Biru dan isu-isu lainnya bidang kelautan dan perikanan

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
3	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya laporan monitoring pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2007
4	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya laporan evaluasi program pembangunan kelautan dan perikanan
5	Pengembangan Database Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Tersusun dan berkembangnya database Pembangunan Kelautan dan Perikanan
IV	**DIREKTORAT SUMBER DAYA MINERAL DAN PERTAMBANGAN**	
1	Pengembangan Energi Terbarukan	Tersusunnya Laporan studi kebijakan mengenai Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia
2	Perencanaan PKPS-BBM; Pembangunan Sumberdaya Mineral Energi dan Pertambangan	Terselenggaranya koordinasi di bidang Perencanaan PKPS BBM dan Pembangunan Sumberdaya Mineral Energi dan Pertambangan
3	Monitoring Pembangunan Bidang Sumberdaya Energi, Mineral dan Pertambangan	Terselenggaranya kegiatan monitoring pembangunan bidang sumberdaya energi, mineral dan pertambangan
4	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Mineral dan Pertambangan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Mineral dan Pertambangan
5	Pengembangan Database Sumberdaya Mineral dan Pertambangan	Tersusunnya dan termutakhirkannya Pengembangan Database Sumberdaya Mineral dan Pertambangan
V	**DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP (DIREKTORAT PENGENDALIAN SDA DAN LH)**	
1	Kajian Pengembangan Alternatif Pendanaan Lingkungan	Tersusunnya studi kebijakan mengenai alternatif pendanaan bidang lingkungan hidup.
2	Koordinasi Pembuatan RKP dan Penyiapan PHLN tahun 2008	Tersusunnya dokumen RKP 2008 di bidang Lingkungan Hidup dan teridentifikasinya kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai oleh PHLN.
3	Monitoring Pelaksanaan RPJM dan RKP Bidang Lingkungan Hidup T.A 2007	Dokumen/laporan pemantauan program, yang dapat digunakan sebagai naskah lampiran pidato
4	Evaluasi Program Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Terevaluasinya pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di tahun 2006.
5	Penyusunan dan Pemutakhiran Basis Data Kegiatan Pembangunan di Dit. Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemutakhiran basis data sekunder di bidang lingkungan hidup.
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup yang dibiayai PHLN	Terselenggaranya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai PHLN.
7	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pemantauan Pelaksanaan IBSAP 2003-2020	Terselenggarannya koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan IBSAP 2003-2020.

LAMPIRAN 6

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
I	**DIREKTORAT PENGAIRAN & IRIGASI**	
1	Kajian kebijakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang berbasis non padi.	Tersusunnya kebijakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang berbasis non padi.
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air	Terselenggaranya koordinasi pembangunan sumber daya air antar *stakeholder*.
3	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air	Terlaksanannya pemantauan pelaksanaan program pembangunan sumber daya air.
4	Evaluasi Pelaksanaan Program Bidang Sumber Daya Air	Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan sumber daya air.
5	Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Sumberdaya Air.	Tersediannya media informasi dan komunikasi tentang pengelolaan sumber daya air bagi seluruh *stakeholder* melalui http://air.bappenas.go.id.
6	Kajian Institusi Pengelolaan Sumberdaya Air Jangka Panjang bekerjasama dengan FAO.	Tersusunnya institusi pengelolaan sumber daya air jangka panjang yang sesuai dengan amanat UU. No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
7	Studi tentang Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya.	Tersusunnya kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya.
8	Penyusunan *road map* pembangunan sumberdaya air.	Tersusunnya *road map* pembangunan sumberdaya air.
II	**DIREKTORAT TRANSPORTASI**	
1	Kajian Strategi Pendanaan Program Pembangunan Sektor Transportasi II : Pasca Revisi Perundang-Undangan Sektor Transportasi	Tersusunnya kajian tentang kajian Strategi Pendanaan Program Pembangunan Sektor Transportasi II : Pasca Revisi Perundang-Undangan Sektor Transportasi
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Transportasi	Terselenggaranya koordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan sektor transportasi antar stakeholder
3	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Sektor Transportasi	Tersusunnya hasil pemantauan tentang pelaksanaan pembangunan nasional Sektor Transportasi.
4	Evaluasi Program Pembangunan Sektor Transportasi: Subsektor Laut	Tersusunnya hasil evaluasi tingkat pencapaian sasaran pembangunan nasional Sektor Transportasi: Subsektor Laut
5	Penyusunan Database Pembangunan Sektor Transportasi Wilayah Sumatera	Tersusunnya database pembangunan Sektor Transportasi Wilayah Sumatera

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
III	**DIREKTORAT PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN**	
1	Studi Akuntabilitas Pelayanan PDAM	Tersusunnya studi akuntabilitas pelayanan PDAM
2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Permukiman dan Perumahan	Terselenggaranya koordinasinya pembangunan permukiman dan perumahan, terutama dalam
3	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Permukiman dan Perumahan	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan RKP Tahun 2007 Sub Bidang Permukiman dan Perumahan
4	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penilaian kinerja pelaksanaan RKP Tahun 2007 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah
5	Pengembangan database Pembangunan Permukiman dan Perumahan	Tersusunnya updated data base mengenai pembangunan perkimrum
IV	**DIREKTORAT ENERGI, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
1	Kajian Strategi Pengembangan Kebijakan Pembangu- nan Tenaga Listrik non Komersial	Tersusunnya rekomendasi strategi
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Energi, Telekomunikasi dan Informatika	Terpantaunya pelaksanaan pembangunan bidang Energi,Telekomunikasi & Info.
3	Penyusunan dan Pemantauan Pelaksanaan PembangunanSektor energi, Telekomunikasi dan Informatika	Tersusunnya hasil pemantauan
4	Kegiatan Kaji Ulang energi, Telekomunikasi dan Informatika	Tersusunnya hasil evaluasi
V	**DIREKTORAT PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA**	
1	Koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat KKPPI	Terselenggaranya koordinasi Sekretariat KKPPI
2	Pemantauan pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)	Terselenggaranya pemantauan pelaksanaan KPS
3	Evaluasi pelaksanaan KPS	Tersusunnya evaluasi pelaksanaan KPS
4	Pengelolaan database KPS	Tersusunnya database KPS
5	Fasilitasi pengembangan proyek infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta (PSPDF)/ PHLN	Terselenggaranya koordinasi pelaskanaan fasilitasi PSPDF
6	Kajian penyempurnaan proses KPS untuk mempercepat realisasi investasi	Tersusunnya rekomendasi kebijakan

LAMPIRAN 7

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
I	**DIREKTORAT KEWILAYAHAN I**	
1	Digitalisasi dan Updating Datadasar Wilayah	Tersedianya datadasar mutakhir antar sektor dan wilayah tahun 2006
2	Pengembangan Peta Spasial Wilayah berbasis GIS	Tersusunnya on-line database dan peta spasial wilayah tahun 2006
	Revitalisasi Unit Kajian Perencanaan Regional (UKPR) melalui:	
3	Pengembangan Model Keterkaitan Regional	Tersedianya model keterkaitan antarwilayah
4	Kajian Penyusunan Strategi Pengembangan Sulawesi	Tersusunnya rekomendasi strategi pengembangan wilayah Sulawesi
5	Kajian Penyusunan Strategi Pengembangan Kalimantan	Tersusunnya rekomendasi strategi pengembangan wilayah Kalimantan
	Publikasi dan Informasi melalui	
6	Penyusunan Publikasi PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ANGKA	Tersedianya Publikasi PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ANGKA
7	Penyusunan Publikasi INFO REGIONAL DAN OTDA	Tersedianya Publikasi INFO REGIONAL DAN OTDA
8	Penyusunan INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	Tersusunnya INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi melalui:	
9	Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pengembangan Wilayah	Terbangunnya kerjasama dalam perencanaan pengembangan wilayah
10	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Terselenggaranya Musrenbang RKP 2008
11	Pemantaun Pelaksanaan Pengembangan Wilayah	Tersusunnya laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah
12	Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Wilayah	Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah
II	**DIREKTORAT OTONOMI DAERAH**	
1	Kajian dampak kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap pengelolaan aparatur pemda	Tersusunnya hasil kajian dampak desentralisasi dan otda terhadap pengelolaan aparatur pemda, dan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan pengelolaan aparatur pemda
2	Koordinasi Penyusunan RKP (Perencanaan Pembangunan) di Bidang Otonomi Daerah	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan (RKP, RKA-KL) termasuk penyiapan PHLN, bidang Desentralisasi Otda.
3	Pemantauan/Monitoring Program Pembangunan di Bidang Otonomi Daerah, termasuk Teknis Pelaksanaan RKP	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan RKP 2007 bidang Otonomi Daerah

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
4	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (pelaksanaan RKP) Bidang Otonomi Daerah	Penilaian kinerja (hasil evaluasi) pelaksanaan RKP 2006 bidang Otonomi Daerah
5	Penyusunan database kelembagaan, aparatur pemerintah daerah dan kerja sama antar daerah	Tersusunnya Database kelembagaan, aparatur pemerintah daerah dan kerja sama antar daerah
III	**DIREKTORAT PEREKONOMIAN DAERAH**	
1	Kajian tentang Hambatan Perdagangan Antar Daerah dan Dampaknya terhadap Perekonomian Daerah	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan antar Daerah
2	Koordinasi perencanaan pembangunan tentang ekonomi, keuangan, dan usaha daerah	Terkoordinasinya dan tersusunnya perencanaan pembangunan (RKP, RKA-KL, dll) tentang ekonomi, keuangan, dan usaha daerah.
3	Pemantauan program dan kegiatan tentang ekonomi, keuangan, dan usaha daerah	Terlaksananya pemantauan program dan kegiatan ekonomi, keuangan, dan usaha daerah, dan tersusunnya laporan pemantauan.
4	Evaluasi program dan kegiatan tentang ekonomi, keuangan, dan usaha daerah	Terlaksananya evaluasi program dan kegiatan ekonomi, keuangan, dan usaha daerah, dan tersusunnya laporan evaluasi.
5	Penyusunan database tentang ekonomi daerah, keuangan daerah, dan usaha daerah	Tersusunnya database tentang ekonomi, keuangan, dan usaha daerah
IV	**DIREKTORAT PERKOTAAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**	
1	Telaah Konsep Bank Tanah (*Land Banking*) dan Prospek Penerapannya di Indonesia	Tercapainya kesamaan persepsi atas konsep Bank Tanah dan prospek penerapannya di Indonesia
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan (RKP, RKA-KL) termasuk penyiapan dokumen PHLN.
3	Pemantauan Program Pembangunan di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan RKP 2007 Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan
4	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan	Penilaian kinerja pembangunan di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan
5	Penyusunan Data Base di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan	Tersusunnya data base di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan
6	Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN)	Terselenggaranya koordinasi tata ruang nasional
7	Koordinasi Nasional Bidang Pertanahan	Terselenggaranya koordinasi nasional di bidang pertanahan

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
V	DIREKTORAT KEWILAYAHAN II	
1	Keterpaduan Penyusunan Model Kerjasama Antar Sektor dan Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Kawasan Andalan dan Kawasan Tertinggal	Tersusunnya Rekomendasi Keterpaduan Penyusunan Model Kerjasama Antar Sektor dan Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Kawasan Andalan dan Kawasan Tertinggal
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Kawasan Tertinggal, Kawasan Andalan dan Kawasan Perbatasan	Tercapainya pemahaman dan komitmen bersama pengembangan kawasan melalui model-model pengembangan kawasan andalan III tertinggal II dan perbatasan I
3	Monitoring Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Kawasan Andalan, Kawasan Tertinggal dan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya laporan monitoring Pengembangan Kawasan Khusus, Kawasan Andalan, Kawasan Tertinggal dan Kawasan Perbatasan
4	Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Kawasan Khusus, dan Kawasan Andalan	Tersusunnya laporan evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Kawasan Khusus, dan Kawasan Andalan
5	Pengembangan Database dan Informasi Pembangunan dan	Tersusunnya informasi dan data ttg:
	Pengembangan Kawasan Andalan, Kawasan Tertinggal dan	1. peta lokasi dan pembangunan ekonomi kawasan strategis, tertinggal dan perbatasan
	Kawasan Perbatasan, serta Kawasan Khusus	2. berita tentang aspek-aspek pembangunan kawasan melalui "buletin kawasan".
		3. program dan hasil kegiatan kawasan- kawasan dalam "web-site kawasan".

LAMPIRAN 8

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
I	DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN (DIREKTORAT ANALISIS DAN FORMULASI PENDANAAN PEMBANGUNAN)	
1	Kajian Pendanaan Pembangunan antar tingkatan pemerintahan terutama dalam memenuhi amanat UU otonomi daerah dan Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal	Tersusunnya laporan identifikasi dan analisis pendanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan (pusat dan daerah) sesuai amanat UU Otonomi daerah dan implementasi Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal serta pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan
2	Koordinasi penyusunan pagu indikatif dan RKP dalam rangka mendukung penyusunan RAPBN dan APBN	Terselenggaranya dan tersusunnya laporan koordinasi
3	Pemantauan Alokasi Pendanaan Pembangunan	Tersusunnya laporan identifikasi deviasi antara perencanaan yang disusun dalam RKP dengan alokasi pendanaan pada APBN dan pelaksanaan APBN
4	Evaluasi Alokasi Pendanaan Pembangunan	Tersusunnya laporan analisis dan evaluasi hasil pemantauan alokasi pendanaan pembangunan
5	Pemeliharaan dan Pengembangan Database APBN	Terselenggaranya Pemeliharaan dan Pengembangan Database untuk menunjang kegiatan kajian, koordinasi perencanaan serta monitoring dan evaluasi
6	Pelaksanaan Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAPP) Sub Komponen Perencanaan Penganggaran	1. Membantu implementasi konsep perencanaan dan penganggaran seperti yang dikehendaki UU No 25/2004 dan UU No 17/2003 2. Capacity building, melalui pelatihan dan workshops guna mendapatkan critical mass staf perencana yang menguasai konsep perencanaan dan penganggaran 3. Perkuatan database, baik dengan penyediaan hardware maupun dengan mengupayakan integrasi antara database perencanaan dan penganggaran
II	DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PENDANAAN PEMBANGUNAN	
1	Kajian Penyusunan Prosedur Pengusulan Proyek PHLN	Menyusun sistem dan mekanisme penyusunan dan pengevaluasian daftar proyek-proyek yang diusulkan untuk dibiayai dengan PHLN.
2	Koordinasi Penyusunan Daftar Proyek PHLN Jangka Menengah (Blue Book 5 Tahunan)	Menyusun dan mengevaluasi daftar usulan proyek-proyek yang akan dibiayai dari PHLN dalam jangka menengah

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
3	Koordinasi Penyusunan Daftar Proyek Tahunan (Blue Book Tahunan)	Menyusun dan mengevaluasi daftar usulan proyek-proyek yang akan dibiayai dari PHLN (Tahunan)
4	Koordinasi Penyusunan Rencana Pelaksanaan Proyek PHLN	Menyusun dan mengevaluasi daftar proyek-proyek sedang dilaksanakan yang dibiayai dengan PHLN tahun 2006
5	Pengembangan Sistem Informasi Terpadu	Menyusun sistem informasi terpadu dilingkungan Deputi Pendanan Pembanguan
6	Pemantauan Pelaksanaan Usulan Proyek PHLN	Tersusunnya laporan pelaksanaan proyek yang dibiayai dari PHLN
7	Kajian Penyusunan Proyek Kemitraan Pemerintah dan Swasta	Tersusunnya Sistem dan Prosedur kerjasama pelaksanaan proyek dengan melibatkan pendanaan swasta
III	**DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN**	
1	Koordinasi dan Konsolidasi Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Terselenggaranya pertemuan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan serta tersosialisasikannya sistem pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
2	Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Tersosialisasinya dan terlaksanakannya Sistem Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan secara berkala dan berkesinambungan
3	Penyempurnaan Program Aplikasi Database Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Terbangunnya dan terlaksanakannya uji coba Program Aplikasi Database Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan guna Optimalisasi Penyerapan Pinjaman LN melalui Penyelesaian Masalah Pembebasan Lahan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan strategis dalam penyelesaian masalah pembebasan lahan pada pelaksanaan Pinjaman LN
5	Midterm Review Pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan	Laporan Midterm Review Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan
6	Penetapan Target Penyerapan Pinjaman LN untuk APBN	Tersusunnya target penyerapan pinjaman luar negeri untuk APBN
7	Penyelenggaraan Joint Review Monitoring Pelaksanaan Pinjaman LN dengan Donor	Terbinanya koordinasi pemantauan pelaksanaan pinjaman LN antara Bappenas dengan Donor
8	Peningkatan Kerjasama dan Komunikasi dengan Institusi-institusi yang menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi	Terselenggaranya kerjasama dan sistem komunikasi yang intensif antara masing-masing institusi dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi
9	Pengumpulan data dan informasi untuk bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi
10	Penyusunan laporan-laporan pemantauan-evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
IV	DIREKTORAT PENDANAAN LUAR NEGERI BILATERAL	
1	Kajian Peningkatan Kerjasama Bilateral Eropa	Melalui kajian ini diharapkan dapat terumuskan dan tersusunnya rekomendasi mengenai langkah-langkah kebijakan peningkatan kerjasama bilateral dengan negara-negara Eropa
2	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Luar Negeri Bilateral	1) Koordinasi dan harmonisasi dalam penyelenggaraan kerjasama pembangunan bilateral, baik Internal Pemerintah Indonesia maupun dengan pihak kreditor
		2) Pemanfaatan ODA secara efektif dan efisien untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan
		3) Terlaksananya rencana/usulan proyek-royek bilateral
		4) Tersusunnya Database proyek-proyek bilateral sebagai bahan rujukan yang sahih
V	DIREKTORAT PENDANAAN LUAR NEGERI MULTILATERAL	
1	Kajian pelaksanaan harmonisasi pelaksanaan kerjasama luar negeri multilateral	Strategi dan action plan pelaksanaan harmonisasi pelaksanaan kerjasama luar negeri multilateral agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan di Indonesia
2	Koordinasi persiaan proyek dan program yang akan dibiayai pinjaman luar negeri multilateral	Dokumen hasil pelaksanaan persiapan beberapa proyek dan program yang akan dibiayai pinjaman luar negeri multilateral baik berupa Project Appraisal Document (untuk Project loan) maupun konsep policy matrix (untuk program loan)
3	Penyusunan dan pengembangan database pendanaan luar negeri multilateral	Sistem database dan petunjuk operasional sistam database pendanaan luar negeri multilateral, serta buku Rekapitulasi database pendanaan luar negeri multilateral (misalnya mengenai lokasi proyek yang dibiayai pendanaan luar negeri multilateral)
4	Penyusunan dokumen lending country strategy dan update pipeline project untuk lembaga pendanaan luar negeri multilateral	Dokumen lending strategy dan pipeline proyek yang sudah di update sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nasional
5	Pengembangan dan penguatan forum Country Portfolio Performance Review (CPPR)	Dokumen joint CPPR antara Pemerintah Indonesia dan lembaga kreditor yang isinya melingkupi upaya-upaya untuk meningkatkan porto polio pelaksanaan proyek yang didanai pendanaan luar negeri multilateral

LAMPIRAN 9

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Inspektorat Utama

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
I	INSPEKTORAT BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
1	Sosialisasi Pedoman/Konsultasi	Terselenggaranya sosialisasi pedoman pengawasan dan konsultasi
2	Pelaksanaan Pengawasan	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	Penyusunan Pedoman	Tersusunnya Pedoman Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan PPA/Proyek/Program
4	Koordinasi Pengawasan Anggaran	Terselenggaranya kegiatan koordinasi di bidang pengawasan
5	Monitoring Anggaran	Terselenggaranya pemantauan terhadap tindak lanjut hasil-hasil pengawasan anggaran
6	Pengembangan Database Pengawasan	Tersusunnya data base bidang pengawasan anggaran yang sudah ditingkatkan/disempurnakan
7	Pelaksanaan Studi, Kajian, Evaluasi Bidang Pengawasan	Tersusunnya hasil studi, kajian, evaluasi bidang pengawasan
9	Kontes PPA di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas	Terselenggaranya Kontes PPA di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
10	Pelatihan Teknis Pengelolaan Anggaran	Terselenggaranya Pelatihan Teknis Pengelolaan Anggaran di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
II	INSPEKTORAT BIDANG KINERJA KELEMBAGAAN	
1	Evaluasi Penerapan/ pelaksanaan Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja (SMAK)	Tersusunnya laporan evaluasi hasil analisis SMAK
2	Audit Organisasi Kementerian PPN/Bappenas	Tersusunnya laporan hasil audit organisasi Bappenas
3	Up date data base pengawasan kinerja	Tersusunya Database pengawasan kinerja
4	Pelaksanaan Monitoring Pengawasan Kinerja Kegiatan UKE II, Bappenas.	Terselenggaranya monitoring thdp tindak lanjut evaluasi kinerja
5	Koordinasi Pengawasan Kinerja Rencana Kerja UKE II	Terselenggaranya koordinasi evaluasi kinerja
6	Audit Kinerja Terhadap Hasil Kajian/Studi Tahun 2006	Tersusunnya laporan audit kinerja hasil kajian/studi
7	Penyusunan Pedoman Audit Kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Tersusunnya pedoman audit kinerja Kementerian PPN/Bappenas
8	Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bidang Pengawasan Kinerja Sektor Publik	Terselenggaranya seminar pengawasan kinerja

LAMPIRAN 10

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
I	**KEGIATAN STAF AHLI MENEG PPN:**	
1	Kajian Staf Ahli Meneg PPN Bidang Ekonomi dan Pembiayaan	Tersusunnya Kajian Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan
2	Kajian Staf Ahli Meneg PPN Bidang Regional dan Sumber Daya Alam	Tersusunnya Kajian Bidang Regional dan Sumber Daya Alam
3	Kajian Staf Ahli Meneg PPN Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan	Tersusunnya Kajian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan
4	Kajian Staf Ahli Meneg PPN Bidang Pemantauan Pembangunan	Tersusunnya Kajian Bidang Pemantauan Pembangunan
5	Kajian Staf Ahli Meneg PPN Bidang Reformasi Hukum dan Reformasi	Tersusunnya Kajian Bidang Reformasi Hukum dan Reformasi Birokrasi
II	**BIRO HUMAS DAN TUP (BIRO HUMAS DAN PAP)**	
1	Koordinasi Penyiapan dan Finalisasi Bahan Pimpinan	Terselenggaranya Penyiapan dan Pengelolaan Bahan bagi Pimpinan secara Efektif dan Efisien
2	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Utama Pimpinan	Teridentifikasinya Kemajuan Pelaksanaan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Utama Pimpinan Bappenas
3	Pengembangan Database Informasi Kehumasan	Tersusunnya Database Informasi Kehumasan
4	Peningkatan Fungsi Kehumasan	Terselenggaranya Kegiatan di Bidang Kehumasan, Media Massa, dan Hubungan Antarlembaga
5	Penyelenggaraan Persidangan dan Keprotokolan	Terselenggaranya Kegiatan Persidangan dan Keprotokolan
6	Penyebarluasan Buku Hasil Studi/Kajian Strategis Bappenas Tahun 2006	Tersosialisasinya Program dan Kebijakan Strategis Pemerintah kepada Masyarakat
7	Konsultan Kehumasan	Tersosialisasinya Program dan Kebijakan yang dihasilkan Bappenas dan Terbangunnya Citra Positif terhadap Bappenas
III	**BIRO HUKUM**	
1	Kegiatan Koordinasi Biro Hukum	Terwujudnya Biro Hukum yang kompeten serta terjalinnya koordinasi yang baik antar staf Biro Hukum dan antara Biro Hukum dengan seluruh stakeholder
2	Penyempurnaan Sistem Informasi Hukum	Sistem Informasi Hukum yang baik
3	Pengembangan Kapasitas SDM Biro Hukum	SDM Biro Hukum yang mumpuni dalam melaksanakan bantuan hukum dilingkungan Bappenas
4	Peningkatan Pelayanan Hukum	1. Koordinasi, Kelengkapan, kesiapan dan finalisasi peraturan yang akan diterbitkan
		2. Penyelesaian tugas dan perkara hukum
5	Penyusunan format perjanjian pinjaman/hibah luar negeri (Loan/Grant Agreement) ideal dan menguntungkan bagi	Tersusunnya format perjanjian pinjaman/hibah luar negeri (Loan/Grant Agreement) ideal dan menguntungkan bagi

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
IV	**BIRO KEPEGAWAIAN**	
1	Kegiatan Koordinasi	Tercapainya Pembinaan Kepegawaian yang lebih baik
2	Kegiatan Sosialiasi	Pemahaman pegawai atas aturan-aturan yang ada
3	Pemuktahiran Data	Tersedianya database kepegawaian yang akurat dan mutakhir
4	Pengembangan Kode Etik SDM Perencana	Buku manual kode etik SDM Perencana
5	Pemetaan kompetensi manajerial SDM Bappenas - Tahap 2 = +/- 80 orang	Tersedianya data potensi manajerial SDM Bappenas
6	Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Individu Berbasis Kinerja	Tersusunnya sistim penilaian kinerja individu berbasis kinerja
7	Pengembangan aplikasi dan implementasi administrasi kepegawaian berbaisis Sistem Informasi Kepegawaian	Berkembangnya aplikasi administrasi kepegawaian yang berbasis sistem informasi kepegawaian
8	Forum "think-tank experiential sharing"	terlaksananya forum "quick sharing for quick learner"
9	Analisis kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bappenas	tersedianya panduan silabus bagi diklat prajabatan, diklat pimpinan, diklat fungsional, diklat gelar, diklat non-gelar, magang, studi banding
10	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bappenas	terlaksananya kegiatan: diklat prajabatan, diklat pimpinan, diklat fungsional, diklat gelar, diklat non-gelar, magang, studi banding
V	**BIRO PERENCANAAN, ORGONISASI DAN TATALAKSANA**	
1	Penyusunan Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Koordinasi Perencanaan Pembangunan dilingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007
2	Pemantauan Kegiatan/ Program di Linkungan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2007	Terselenggaranya Pemantauan Kegiatan/ Program Di Lingkungan Kantor Meneg.PPN/ Bappenas Tahun 2007
3	Penyusunan Database kegiatan tahun 2006	Tersusunnya database kegiatan tahun 2007
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bappenas Tahun 2006	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Bappenas Tahun 2008
5	Penyusunan Jurnal Kajian Bappenas	Tersusunnya Info Kajian Bappenas edisi tahun 2007
6	Evaluasi Kegiatan dan Program Kerja Kementerian PPN/Bappenas	Evaluasi Kegiatan dan Program Kerja Kementerian PPN/Bappenas bagi input rencana tahun 2008
7	Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	Tersusunnya evaluasi terhadap kelembagaan kementeruan PPN/Bappenas
8	Rapat Kerja Tim Anggaran	Terselenggaranya rapat kerja Tim Anggaran tahun 2007
9	Penyusunan Pedoman Tentang Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas	Tersusunnya Pedoman Tentang Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
VI	**BIRO UMUM**	
1	Pembuatan Database Pengontrolan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Tersusunnya database pengontrolan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
2	Pengembangan Database Penggajian	Tersusunnya database penggajian
3	Implementasi Database Arsip Persuratan	Tersusunnya database arsip persuratan
4	Pembuatan Database Persediaan ATK	Tersusunnya database persediaan ATK
5	Pembuatan Database Penatausahaan Kendaraan Dinas	Tersusunnya database penatausahaan kendaraan dinas
6	Koordinasi Urusan Dalam	terselenggaranya koordinasi urusan dalam
7	Koordinasi Pengelolaan Keuangan	terselenggaranya koordinasi pengelolaan keuangan
9	Koordinasi Verifikasi Anggaran	terselenggaranya koordinasi verifikasi anggaran
10	Koordinasi Perlengkapan dan Tata Usaha	terselenggaranya perlengkapan dan tata usaha
	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan (dikoordinasikan oleh Biro Umum)	Terselenggaranya Dukungan Kegiatan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
11	- Gaji Upah	Terdistribusikannya gaji pegawai
12	- Belanja Barang	Tersedianya barang pendukung kegiatan pimpinan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (dikoordinasikan oleh Biro Umum)	Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
13	- Honor tidak tetap	terdistribusikannya honor tuk pegawai
14	- Belanja bahan & ATK	Tersedianya bahan dan ATK
15	- Belanja barang operasional lainnya	Tersedianya barang operasional lainnya
16	- Jasa Lainnya	Terlaksananya jasa untuk peningkatan sarana dan prasarana
17	- Belanja Modal Tanah	Tersedianya asset
18	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tersedianya peralatan dan mesin
19	- Belanja Modal Fisik lainnya	Tersedianya sarana fisik lainnya
20	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan gedung dan bangunan
21	- Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin
22	- Biaya Pemeliharaan Jaringan	terselenggaranya pemeliharaan jaringan
23	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terselenggaranya monitoring dan tersusunnya laporan
24	Peningkatan keahlian	Terselenggaranya peningkatan kemampuan SDM

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
VII	**PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**	
	Perawatan/ Operasional	
1	**KAJIAN**	
	- **Study** of Performance Tunning Sistem Jaringan Komputer Bappenas	- Rekomendasi kebijakan pemanfaatan teknologi sistem jaringan Bappenas yang paling sesuai dan optimal
	- **Study** of Integrated Digital Decision Support Systems Bappenas	- Rekomendasi kebijakan pemilihan teknologi dalam penerapan Integrated Digital Decision Support System
2	**PRASARANA**	
	Operasional dan Pemeliharaan :	
	ISP Telkom Astinet 2Mbps	Pelayanan Sambungan Internet
	ISP Ipteknet 64 Kbps	Pelayanan Sambungan Internet
	Jaringan Komputer	Stabilitas terhadap operasional sistem jaringan komputer
	Pengembangan Jaringan Komputer	Mengoptimalisasi penggunaan perangkat TIK
	Software Server	Mengoptimalisasi penggunaan perangkat TIK
	PC	Mengoptimalisasi penggunaan perangkat TIK
	Printer	Mengoptimalisasi penggunaan perangkat TIK
	UPS 80 KVA	Mengoptimalisasi penggunaan perangkat TIK
	UPS 60 KVA	Mengoptimalisasi penggunaan perangkat TIK
	UPS 12 KVA	Mengoptimalisasi penggunaan perangkat TIK
	Networking Security Specialist	Mengoptimalisasi penggunaan perangkat TIK
	Pengadaan Prasarana dan Sarana TI	
	PC (80 unit)	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	Printer (20 unit)	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	Storage/ media penyimpanan	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	Baterei UPS	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	NoteBook (40 unit)	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	Anti Virus	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	Backup System	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
	Software support	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	Switch Otomatis PLN/Genset UPS	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	Penambahan Outlet UPS	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	Kebutuhan Utk Gedung Bappenas di Kuningan	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	Server	
	Pengembangan sistem jaringan komputer. Gd kuningan	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	- Switch (Manageble)	
	- Rack	
	- UTP Kabel 10/100/1000	
	- Material Pendukung	
	- Seting and Installation	
	-Lain-lain	
	Operasional. dan Pemeliharaan, Jaringan	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	UPS utk perangkat Jaringan	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	Interrnet Koneksion 512Kbps	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	Istallasi Internet+perangkat	Penyediaan perangkat TIK sesuai kebutuhan
	Perawatan PC 75 unit, Printer 25	Menoptimalisasi penggunaan perangkat TIK
3	**E-OFFICE**	
	- Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Koordinasi Internal dan dan Eksternal Bappenas	- Terpeliharanya sistem aplikasi berbasisi web (intranet dan internet) dengan kemampuan yang integratif dan interaktif, mengakomodasikan personel need dan personel duty secara integrasi bagi seluruh komponen pegawai pada kantor Kementerian PPN/Bappenas, serta pengembangan modul-modul sistem untuk mendukung fitur Sistem Intranet Bappenas
	- Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi ELS	- Terpeliharanya Sistem Aplikasi ELS

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
	- Pengembangan Decision Support Systems (Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan)	- Tersedianya sistem aplikasi berbasis web yang merupakan *intelligence interface* daripada sistem manajemen database internal Bappenas, Simrenas, perangkat lunak *analysis tools* berlisensi dan sistem aplikasi *in-house made* untuk men-dukung pengambilan keputusan
	- Koordinasi Teknologi Informasi dalam Pengembangan Database Pembangunan	- Terbinanya hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait yang merupakan pengelola data dan 'infornasi - Terlaksananya kesepakatan terhadap standarisasi/ platform teknologi informasi yang digunakan dalam pengembangan database pembangunan
	- Pemantauan Pengembangan Database Pembangunan	- Melakukan review dan desain terhadap pengembangan database untuk pelaksanaan yang lebih 'sederhana, efektif dan efisien
	- Penyusunan Database Pembangunan	- Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi sehingga dapat
	- Pengembangan Sistem Manajemen Database Internal Bappenas	Terbentuknya sistem aplikasi database yang mengintegrasikan data dan informasi perencanaan
	- Pengembangan dan Pemeliharaan Manajemen Situs Bappenas	- Tersedianyan data dan informasi yang mutakhir - Tersedianya data dan informasi bagi para stakeholder sebagai bahan referensi di bidang perencanaan pembangunan
	- Pengembangan/Penguatan Basis Data Pembangunan Simrenas	- Tersebarluaskannya kebijakan-kebijakan baru, program aplikasi baru, tentang pengumpulan,pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan yang diperlukan institusi perencanaan di pusat dan daerah; - Terfasilitasinya instansi pemerintah pusat dan daerah yg berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi regional dan sektoral sesuai format bakunya; - Terbangunnya hubungan kerja sama dengan pengelola sumber data dan informasi guna memperlancar pasokan data dari waktu ke waktu; - Tertampungnya usulan, pendapat, kritik, saran dan alternatif pemikiran serta pemantauan secara terbuka dr seluruh instansi perencanaan bagi penyempurnaan sistem dan konten basis data ke depan;

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
		- Tersempurnakannya Sistem Basis Data Pembangunan serta fasilitas aksesnya bagi pengguna akhir;
		- Terlaksananya penggunaan dan pemanfaatan basis data, beserta perangkat analisisnya kepada semua propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia;.
		- Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan dari seluruh propinsi/kabupaten/kota Indonesia secara terintegrasi.
	Digital Journal	
	- Kemitraan Untuk Kemakmuran Masyarakat Miskin (Dana Pendamping Pe-PP)	- Monitoring dan mengevaluasi kegiatan Partnership for e-Prosperity for The Poor (Pe-PP)
4	**Pustaka**	
	Pengadaan Bahan Pustaka	
	1. Buku Terbitan Asing	- Bertambahnya koleksi bahan pustaka dan untuk menunjang pelaksanaan tugas bagi pegawai Bappenas dan instansi lain selain itu sebagai upaya peningkatan pelayanan informasi kepada pengguna
	2. Buku Terbitan Indonesia	
	3. Langganan Majalah 17 Judul	
	4. Langganan Surat Kabar 17 judul *)	- Pemerataan dalam penyediaan langganan surat kabar untuk setiap Uke I + Staf Ahli (max 4 judul) dan UKE II (max 2 judul)
	Penjilidan dan Perbaikan Cover	- Tersusunnya bahan pustaka sesuai dengan jenis dan golongannya, memudahkan penyimpanan, pencarian, pengecekan, serta menghindari terjadinya kehilangan
	Penjilidan	
	1. Majalah	
	2. RAPBN/APBN *)	
	3. Himpunan Pidato Presiden *)	
	4. Warta perundang-undangan	
	5. Statistik dan Laporan BI	
	Perbaikan Cover *)	- Memperbaiki cover yang rusak agar dapat terpelihara kelestariannya serta dapat bertahan lama
	1. Nota Keauangan/APBN	
	2. Himpunan Pidato Presiden	
	3. RAPBN	
	4. Sambutan Meneg.PPN/Ketua Bappenas	

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
	Proses Alih Media/Digitalisasi	- Efektif dan efisien dalam pekerjaan, pelayanan, penyimpanan dan membantu dalam menelusuri
	1. Mikrofilm DIP ke CD thn 89/90 s/d 90/91	bahan pustaka secara cepat dan tepat serta dapat diakses dari berbagai tempat serta
	2. Pembuatan Abstrak artikel Majalah ke ELS *)	memudahkan bagi pengguna untuk mengetahui isi artikel
	3. Scanning TOC Buku, Dokumen dan Statistik *)	
	4. Scanning Perundang-undangan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	- Efektif dan efisien dalam pekerjaan, pelayanan, Penyimpanan
	1. Mesin Scanner High Speed **)	dan membantu dalam menelusuri bahan pustaka secara
	2. Mesin Faximili *)	cepat dan tepat serta dapat diakses dari berbagai tempat
	3. DVD Combo *)	
	4. CD Duplicator *)	
	5. Sparepart untuk Scanner Panasonic KV 6045	
	- 1 (satu) set Maintenance Kit 1:	
	* Paper Feed roller	
	* Retard roller	
	* Separation roller and lamp	
	* CCD Flexcable	
	* ADF White Standart Sheet	
	Pemeliharaan Bahan Pustaka	- Untuk mencegah, mengobati, melestarikan bahan pustaka
	1. Fumigasi +800 m3	sehingga terhindarnya kerusakan dari serangga dan jamur
	2. Pembersihan Debu	
	3. Stock Opname *)	- Untuk memeriksa kondisi fisik bahan pustaka, mencatat
	4. Service Microfilm merk 3M dan Minolta	dan menghitung kembali bahan pustaka yang dimiliki perpus
	5. Scanner Panasonic KV 6045	serta untuk mempercepat pekerjaan dan pelayanan
	6. Software Paper save	
	Kerjasama dengan Perpustakaan/Instansi lain *)	
	1. Pembinaan dan Pengembangan SDM Staf	- Meningkatnya ketrampilan dan keahlian seluruh staf
	- Kursus Perpustakaan (Pembuatan Abstrak)	perpustakaan
	- Kursus Kearsipan (Pengelolaan Arsip berbasis Tek. InfoKom)	
	2. Sarana dan Prasarana Layanan Perpustakaan	- Bertambahnya koleksi bahan pustaka, terbentuknya
	- Menyediakan data yang tidak tersedia di	jaringan untuk akses
	perpustakaan Bappenas (Per tahun)	

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
VIII	**PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK**	
1	Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RUU Pengadaan Publik
2	GFMRAP Sub Komponen Pengadaan	Implementasi e-proc di beberapa daerah dan departemen
3	Strengthening National Capacity For Public Monitoring Government Reform	Uji coba konsep mekanisme pengawasan masyarakat
IX	**PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA**	
	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEGARA	
1	**PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (Bappenas, Pusat dan Daerah)**	
1	Penyelenggaraan Diklat Gelar S-2 Double Degree	Terselenggaranya Dilklat Gelar S-2 Double Degree bagi 60-120 peserta/thn
2	Penyelenggaraan Diklat Gelar S-2 Luar Negeri	Terselenggaranya Dilklat Gelar S-2 Luar Negeri bagi 20-30 peserta/thn
3	Penyelenggaraan Diklat Gelar S-2 Dalam Negeri 13 bulan	Terselenggaranya Dilklat Gelar S-2 Dalam Negeri bagi 280-350 peserta/thn
4	Penyelenggaraan Diklat Gelar S-3 Dalam Negeri	Terselenggaranya Dilklat Gelar S-3 Dalam Negeri bagi 5-15 peserta/thn
5	Penyelenggaraan Diklat Gelar S-3 Luar Negeri	Terselenggaranya Diklat Gelar S-3 Luar Negeri bagi 5-10 peserta/thn
6	Penyelenggaraan Diklat Gelar S-3 Linkage	Terselenggaranya Diklat Gelar S-3 Linkage bagi 10-15 peserta/thn
7	Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan Fungsional Perencana (JFP)	Terselenggaranya Diklat Penjenjangan Fungsional Perencana (JFP) bagi 350-750 peserta/thn
8	Penyelenggaraan Diklat Penunjang JFP	Terselenggaranya Diklat Penunjang JFP bagi 60-120 peserta/tahun
9	Penyelenggaraan Diklat Non-Gelar Teknis Substantif	Terselenggaranya Diklat Non-Gelar Teknis Substantif bagi 750-1000 peserta/thn
10	Penyelenggaraan Diklat Persiapan Bahasa	Terselenggaranya Diklat Persiapan Bahasa bagi 200-300 peserta/thn
11	Penyelenggaraan Diklat Magang/ Joint Research	Terselenggaranya Diklat Magang/ Joint Research bagi 10-25 peserta/thn
12	Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan Struktural Bappenas	Terselenggaranya Diklat Penjenjangan Struktural bagi 25-40 peserta/thn
13	Penyelenggaraan Diklat Teknis Bappenas	Terselenggaranya Diklat Teknis bagi 200 peserta/thn
2	**PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR - JFP**	
1	Sosialisasi	Terselenggaranya Sosialisasi JFP dan Diklat Perencanaan di 20-30 tempat/thn
2	Fasilitasi	Terselenggaranya Fasilitasi JFP di 15-20 Propinsi/Kabupaten/Kota
3	Bimbingan Teknis	Terselenggaranya Bimbingan Teknis di 15-20 instansi/thn

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

NO	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan JFP	Tersusunnya Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan JFP di 15-20 Lokasi/tahun
5	Penyebaran Informasi dan Pelayanan Perencana	Tersebarnya Informasi JFP melalui Media Cetak dan Elektronik
3	**PENYEMPURNAAN SISTEM & KUALITAS**	
	PENYELENGGARAAN DIKLAT PNS PERENCANA	
1	Penyusunan Kebijakan Diklat Gelar	Tersusunnya Kebijakan Diklat Gelar
2	Penyusunan Kebijakan Diklat Non-Gelar	Tersusunnya Kebijakan Diklat Non-Gelar
3	Penyebaran Informasi Diklat Perencanaan	Tersebarnya Informasi Diklat Perencanaan melalui Media Cetak dan Elektronik
4	Pemantauan dan Evaluasi Diklat Perencanaan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Diklat di 15 lokasi
4	**PENYIAPAN & PENYEMPURNAAN BERBAGAI PERATURAN DAN**	
	KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN	
1	Review & Evaluasi Penyelenggaraan Diklat dan JFP	Tersusunnya Penyempurnaan Pedoman Penilaian AK
2	Penyusunan Pedoman E-Learning	Tersusunnya Pedoman e-Learning
3	Penyusunan Pedoman Manajemen Diklat	Tersusunnya Pedoman Manajemen Diklat
4	Penyusunan Pedoman Pembiayaan Diklat	Tersusunnya Penyempurnaan Pedoman Pembiayaan Diklat
5	Penyusunan Database Perencana dan Diklat	Terwujudnya Database Perencana dan Diklat
6	Kajian Studi Revitalisasi Unit Perencanaan Pusat dan Daerah	Terbentuknya Unit Koordinasi Pengelolaan JFP dan Diklat Perencanaan di 33 Propinsi
7	Kajian Studi Analisis Jabatan Fungsional Perencana	Tersusunnya Pedoman Analisis Kebutuhan Diklat di Bappenas
8	Kajian Studi Penilaian Kinerja Perecana Pusat & Daerah	Tersusunnya Pedoman Penilaian Kinerja Perencana Pusat & Daerah

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Juni 2006

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

H. PASKAH SUZETTA